

# REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PEMBELAJARAN PKn BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

**Bambang Sumardjoko**

Guru Besar Program Studi PKn FKIP UMS

Jalan A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57102

(email: bsmardjoko@yahoo.co.id)

**Abstract:** *General purpose of the research is to find and develop Pkn learning model at Junior High School bases local wise for revitalization pancasila values strategy to strength character and self characteristic country. This research is for two years. The first year, the research is qualitative research. Collecting data technique are interview, attentively method and observation. Analysis data uses interactive method. Focus problem reviews and planning draft model uses qualitative approach with pathways: (1) literature study, collecting materials support relationship Pkn learning model, (2) field data colleting and triangulation data descript PKn learning model at Junior High School implementation, (3) SWOT analysis constructs draft model, and (4) refining design model (tentative) by workshop participation-collaborative. Result of the research shows (1) Profile background PKn teachers at Junior High School of Surakarta are PKn education and they have experience teach a long time. (2) PKn teachers have experience in scientific activities in local or national so understanding PKn teachers Junior High School of Surakarta about the primary and purpose of citizenship education is enough good. (3) To development PKn learning is powerfull it needs revision to PKn material, the primary about (a) integration local culture value and (b) strategy and learning method support mastery competent PKn and education value. (4) According SWOT analysis, draft develops PKn model in Junior High School bases local wise for revitalization strategy Pancasila values to strength character and self characteristic of country with (a) wise integration local java culture source from core value esteem, social problem solving, study with social interaction and study with interaction social-culture, (c) implementation draft model with problem based learning model, project based learning and value classification.*

**Keywords:** *model, revitalization, Pancasila, local wise, PKn, character*

## Pendahuluan

Salah satu wacana yang dominan dalam studi globalisasi adalah hipotesis tentang “*homogenitas budaya*” (Hannerz, 1991: 250). Untuk itu menurut Jenkins (2004: 115) diperlukan peran kearifan lokal yang secara kritis mengubah dan membentuk budaya global menjadi bermakna dan sesuai dengan kehidupan sosial budaya lokal. Menurut Tilaar (2007:15) etnisitas, identitas budaya, kepemilikan dan kebanggaan terhadap bu-

daya sendiri dalam kehidupan bersama merupakan “*political nation-state*”. Kesadaran seperti itu hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan dan komunikasi dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang cukup mengawatirkan dan nilai-nilai kearifan lokal telah tergerus oleh arus pendidikan global. Kondisi seperti ini berakibat menipisnya tatakrama, etika, dan kreativitas anak bangsa. Dunia pendidikan dianggap tidak

mampu melahirkan lulusan yang berkualitas, yakni manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa juga disebabkan karena mengendornya pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Padahal kesadaran kolektif seperti itu merupakan modal dasar dan modal sosial serta merupakan *character and nation building* guna memperkokoh integrasi bangsa.

Pasal 3, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Di Indonesia kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Secara teoretik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, PKn dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan penga-

laman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2012: 24).

PKn mempunyai misi sebagai pendidikan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta sebagai “*subject-specific paedagogy*” (pembelajaran materi subjek) bagi guru PKn. Dengan demikian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan Pancasila secara preventif, yakni melakukan usaha meningkatkan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengamalannya melalui pendidikan, penerangan, pembinaan kesadaran nasional, pembinaan kesadaran wawasan nusantara dan usaha-usaha pencegahan lainnya. PKn di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Kajian tentang Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga Negara yang baik selalu menimbulkan kerumitan, karena *pertama*, pendidikan kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan sehingga rentan untuk dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rezim politik. *Kedua*, konsep kewarganegaraan berkaitan dengan, atribut “baik” dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan. *Ketiga*, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (*good citizen*) tetapi juga membangun seorang warga negara yang berpartisipasi aktif (*active citizen*).

Kemudian realitas di lapangan

menunjukkan adanya gejala keinginan untuk menolak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang semata-mata menampilkan nilai moral. Di sisi lain Pendidikan Kewarganegaraan dianggap kehilangan karakteristik akademisnya karena tidak terdapatnya teori-teori keilmuan yang cukup memadai. Model pembelajaran PKn dinilai lebih menekankan kepentingan rezim politik dengan materi yang tidak menarik dan formalistik. Proses pembelajaran tidak mendorong kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Hal ini disebabkan karena (1) materi yang diajarkan cenderung verbalistik atas nilai-nilai moral Pancasila sebagai *civic virtues*, (2) model pembelajarannya cenderung berbentuk hafalan kognitif sehingga menimbulkan kejenuhan karena materi yang diajarkan cenderung monoton, teoretik, kognitif bahkan verbalistik (Samsuri, 2010: 130). Untuk itu perlu dikembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter bangsa, suatu pembelajaran yang mampu merealisasikan tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pembelajaran PKn para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajarannya perlu diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat (*learning by doing*), belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), belajar melalui perlibatan sosial (*socio-participatory learning*), dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa.

Secara kebahasaan, revitalisasi berarti proses, cara atau tindakan untuk memvitalkan (menganggap penting) kembali. Revitalisasi diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Konsep revitalisasi menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan mereka memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi dorongan tersebut diperlukan kriteria yang memperkuat dalam menentukan warisan budaya yang seharusnya direvitalisasi, yang didasarkan pada filosofi, kepercayaan, sosio-budaya, dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi yang harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk masing-masing kriteria itu selalu berubah menurut persepsi masyarakatnya. Jika kriteria warisan budaya ini dapat dikelompokkan menurut posisi, makna, dan skala peranan maupun proses pemantapannya maka prioritas revitalisasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi terbagi menjadi tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat). Menurut Hasan (2001), revitalisasi bertujuan untuk 1) menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya, 2) meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis, 3) merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya, 4) mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat, 5) memperkuat identitas kawasan, dan 6)

mendukung pembentukan citra kota.

Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik tetapi harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Dengan demikian, revitalisasi pada hakikatnya adalah membangkitkan kembali vitalitas atau usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali. Revitalisasi pada hakikatnya adalah suatu upaya membuat sesuatu (budaya) dengan meninjau ulang akan kekurangannya untuk disesuaikan dengan kondisi zaman dalam upaya memenuhi kebutuhan yang lebih bermanfaat.

Kemudian, bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila pada hakikatnya adalah dasar Negara (filsafat negara) sekaligus pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna pokok dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kedudukan dan fungsi tersebut bersifat hakiki. Karena itu, berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain, seperti sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur, tujuan bangsa, termasuk sebagai norma dasar dan kriteria dasar watak/ kepribadian manusia Indonesia semuanya dapat dikembalikan pada sifat hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai Pancasila yang hakiki itu lahir berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara material, rumusan Pancasila memuat nilai-nilai manusiawi sedangkan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia.

Atas dasar itu maka keberadaan Pancasila pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang berharga, yang memuat nilai-nilai dasar manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada setiap individu manusia diterima oleh Bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya dari nenek moyangnya. Hingga kini, nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat Indonesia. Sari dan puncak sosio-budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai pandangan hidup. Karena itu, nilai-nilai Pancasila tampak dari dalam kehidupan sosio-budaya bangsa Indonesia, seperti adanya (a) Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta; (b) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat; (c) Asas musyawarah mufakat. Kebersamaan merupakan kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Agar mereka tetap rukun dan bersatu, maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat; (d) Asas gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama secara gotong royong oleh dan untuk kebersamaan; (e) Asas tenggang rasa; saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi; saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Selanjutnya, bagaimana dengan masalah kearifan lokal. Secara umum, *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat

katnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4) kearifan lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kearifan lokal menurut Wales diartikan sebagai “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as result of their experiences in early life*” (dalam Atmodjo, 1986:46). Berdasarkan rumusan ini, menjadi jelas bahwa lokal yang dimaksud Wales merupakan substrat kebudayaan Pra-Indian atau yang disebut sebagai “Pribumi” (Poespowardojo, 1986: 30). Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai *local development*, yaitu perkembangan setempat yang arahnya menuju ke arah perubahan. Kearifan lokal dan perkembangan lokal berkembang setelah terjadinya kontak kebudayaan atau akulturasi dengan kebudayaan lain, terutama yang datang dari India (kebudayaan Hindu). Kearifan lokal bangsa Indonesia merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat (Atmodjo, 1986:47).

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Sebagaimana dikatakan Geertz (1963: 26) bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal

dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.

Dari konsep tersebut di atas maka kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan kebudayaan bangsa di atas dasar identitas sejumlah etnik yang mewarnai Nusantara ini.

Kemudian bagaimana dengan kearifan lokal budaya Jawa. Secara umum kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan Surakarta atau disebut wilayah kebudayaan Jawa *Negarigung*. Sedangkan “kebudayaan pesisiran” meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa yang berpusat di wilayah Pati, Blambangan, dan Tegal (Sukmawati: 2004:12).

Geertz (1981: X-XII) menggambarkan masyarakat Jawa terutama yang berada di wilayah kebudayaan Jawa *Negara gung* memiliki pandangan hidup atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mempunyai pedoman dalam melakukan tinda-

kan. Pandangan orang Jawa dalam melihat, memahami, dan berperilaku berorientasi dan bersumber dari budaya. Karena itu perkembangan budaya Jawa selaras dengan dinamika masyarakat yang mengacu pada konsep budaya induk, yaitu “*sangkan paraning dumadi*” (dari mana dan mau ke mana) yang menunjukkan bahwa hidup bagi orang Jawa adalah sebuah “*telaku*” (perjalanan). Hidup di dunia harus memahami dari mana ‘asal’, akan ke mana ‘tujuan’, dan ‘akhir’ perjalanan hidupnya untuk mencapai “*kasampurnaning dumadi*” (kesempurnaan tujuan hidup) sehingga dianggap “*wingkan sangkan ing paran*”.

Menurut Soeseno (2000: 76) kebudayaan Jawa selalu berhubungan dengan nilai-nilai falsafah kejiwaan maupun pola pikir. Hal yang bersifat filsafati terletak pada nilai-nilai simbolisme akibat adanya kontak antara manusia dengan mikro-makro kosmos, antara kehidupan lahir dan batinnya yang disebut “*kejawen*”. Titik berat yang melatar belakangi kejawen disebut “*ngilmu*” sehingga ilmu kejawen dapat menembus lingkungan bersifat umum dan universal.

Dalam tataran epistemologis, ilmu pengetahuan dinilai sebagai sebuah “*kawruh*”, maka kegiatan seseorang untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan disebut “*ngangsu kawruh*”. Budaya pikir masyarakat Jawa lebih mengkombinasikan pengalaman dan kesesuaian hati dibandingkan dengan rasional dan empiris. Karena itu, aktivitas pemikiran dalam budaya Jawa diistilahkan sebagai “*menggalih*”, yang berarti menggunakan hati nurani, kata “*galih*” yang berarti hati. Kebenaran tertinggi yang dicapai oleh “*kawruh*” bukanlah kebenaran kritis seperti disyaratkan oleh ilmu pengetahuan melainkan satu pendekatan tentang kebijakan yang diistilahkan sebagai *kabecikan*. Ada ungkapan kebenaran belum tentu dekat kepada kebijakan atau “*bener iku durung mesti pener*”. Seseorang tidak hanya butuh mengetahui ke-

benaran tetapi juga harus terarah kepada kebijakan sebagai tujuan akhir (Sutrisno, 2002).

Unsur kejiwaan kebudayaan Jawa menjadikan manusia berbudi luhur dan suci dalam sikap bathin dan tingkah lakunya. Lahirnya nilai-nilai tersebut karena adanya hubungan antara manusia dengan manusia dengan Sang Hyang Illahi yang bersifat universal. Keseimbangan antara hati nurani yang berinteraksi dengan alam dan Sang Hyang Pencipta dengan dilandasi penalaran intelektual disebut “*ngelmu*”. Ketiganya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan orang Jawa. (Mulder, 1996).

Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Prabowo (2003: 24) membagi budaya menjadi dua, yaitu budaya lahir dan batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal itu, budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung masyarakat. Sebaliknya budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan penghitungan empiris atau objektif tetapi menduduki posisi yang penting dalam sistem kehidupan masyarakat Jawa. Budaya batin yang dalam klasifikasi Koentjaraningrat (1982: 2) dimasukkan pada sistem religi atau keagamaan Jawa tersimbolisasikan dalam ungkapan *manunggaling kawula Gusti*.

Salah satu wujud ideal kebudayaan masyarakat Jawa adalah *Kejawen*. Kata *kejawen* berasal dari kata Jawi yang merupakan bentuk halus atau krama dari kata Jawa. Pengertian pertama kejawen mencakup segala hal yang berhubungan dengan pandangan hidup Jawa serta wawasan tentang Jawa. Menurut Mulder (1996: 7), kejawen bukan suatu agama tetapi cenderung kepada suatu etika dan gaya hidup yang berpedoman pada pemikiran khas

Jawa. *Kejawen* sering disebut dengan istilah *Ilmu Jawi*, suatu ajaran tentang cara menjadi seorang manusia Jawa seutuhnya. Pandangan dunia Jawa bertolak dari perbedaan antara dua segi fundamental seperti atas dan bawah serta hal-hal yang telah disebutkan di atas. Inilah yang menjadi titik tolak dari ajaran kejawen yang pada intinya adalah *kebatinan*, yakni gerak diri harus mengalir dari luar ke dalam, dari penguasaan lahir ke pengembangan batin. Karena itu kejawen pada hakekatnya adalah menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih tinggi hingga lebur (*transenden*).

Manusia dinilai keberadaannya dalam konteks kosmologis, di tengah alam semesta yang diyakini merupakan kancah peperangan antara dua kekuatan untuk diselaraskan. Sebagaimana diungkapkan Suseno (1991: 39), bahwa keselarasan hidup dalam masyarakat Jawa ditentukan dua prinsip dasar, yaitu prinsip rukun dan hormat. Ditambahkan oleh De Jong (1985: 19-20) sifat orang Jawa adalah (1) *Narimo*, yang berarti merasa puas dengan nasibnya dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana sendiri untuknya, (2) *Rila*, yang berarti keikhlasan hati yang didasari pemahaman bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah barang pinjaman, sewaktu-waktu akan diambil kembali, (3) *Sabar*, merupakan kelapangan dada dalam melewati segala cobaan. Kesabaran diibaratkan dengan samudera yang tidak pernah meluap meski sebanyak apapun air yang mengalirinya.

Sikap hidup yang mencerminkan kerukunan tersebut tidak terlepas dari sikap *tepo slira* (tenggang rasa). Dengan berbekal kesadaran bahwa *nandur bakal ngundhuh* (menanam akan memetik) atau *ngundhuh wohing pakarti* (memetik buah perbuatan), sikap dan perilaku orang Jawa sesungguhnya dikenal-dalkan oleh cahaya hati nurani untuk menjauhi perbuatan nista. Bagi orang Jawa tidak berpikiran bahwa pada saat mereka memberi harus kembali kepadanya dalam bentuk ke-

baikan lain. Karena itu harus ikhlas dan *rila legowo* pada saat membantu, menyumbang atau meminjamkan sesuatu pada orang lain. Dalam konteks kebaikan seperti itu menurut Suratno dan Astiyanto (2009: 99) "keikhlasan" adalah ibarat "*idhep-idhep nandur pari jero*" *Pari jero* artinya padi yang memerlukan waktu lama untuk dapat *dipanen*.

Budaya Jawa mengutamakan *rasa, cipta*, dan *karsa* dalam hidup. Ketiganya berpadu menjadi satu kesatuan yang erat. Menurut Mulder (1986) terdapat *tiga nilai utama* dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, khususnya di lingkungan keluarga *priyayi* di Surakarta. Ketiga nilai utama itu adalah *hormat, rukun, dan tolong-menolong*. Berdasarkan dasar pemikiran dan tinjauan teoretis di atas maka pertanyaannya adalah bagaimanakah pengembangan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa?

## Metode

Penelitian pengembangan ini dilakukan selama dua tahap dalam waktu dua tahun. Tujuan umum penelitian adalah menemukan dan mengembangkan model pembelajaran PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa. Tujuan penelitian tahun ke -1 adalah (1) mendeskripsikan profil guru pendidikan kewarganegaraan di SMP Surakarta, (2) mendeskripsikan pemahaman guru SMP di Surakarta tentang Pendidikan Kewarganegaraan, (3) mendeskripsikan pembelajaran PKn di SMP dalam penguatan karakter dan jati diri bangsa yang saat ini dilaksanakan, dan (4) menemukan draf model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa (tentatif).

Untuk tujuan tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan dua tahap. Penelitian tahun pertama merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, metode simak, dan observasi. Derajat keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan derajat kepercayaan, kecukupan referensi, dan triangulasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode interaktif. Fokus permasalahan yang dikaji dan perencanaan draf model menggunakan pendekatan kualitatif dengan menempuh alur pelaksanaan sebagai berikut: (1) studi literatur, dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan model pembelajaran PKn, (2) pengumpulan data lapangan dan triangulasi data dilakukan untuk mendeskripsikan model pembelajaran PKn di SMP yang saat ini dilaksanakan, (3) analisis SWOT untuk menyusun draf model, dan (4) perumusan desain model (tentatif) melalui lokakarya partisipatif-kolaboratif.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemahaman Guru SMP Surakarta Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Berbicara tentang pemahaman guru PKn terhadap hakikat dan maksud PKn maka dapat digambarkan sebagai berikut. Seluruh responden menyetujui bahwa PKn di tingkat persekolahan bertujuan mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*). Tujuan yang terperinci menjadi beberapa butir tersebut dipahami para guru PKn, yakni (1) warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*); (2) memiliki keterampilan (*skills*), (3) mengembangkan sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Berbagai pendapat ini menunjukkan bahwa guru-guru PKn di Surakarta memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap konsep dan tujuan PKn.

Berdasarkan wawancara lebih lanjut, salah satu responden menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran setelah terpecah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada awalnya mata pelajaran tersebut digabungkan menjadi satu, karena isi dari Pendidikan Kewarganegaraan bersumber dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dipecah menjadi mata pelajaran sendiri karena Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting untuk diajarkan kepada siswa. Hal tersebut karena dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan materi kewarganegaraan yang lebih luas dan sumbernya tidak hanya langsung dari Pancasila. Mempelajari materi Pendidikan Kewarganegaraan bagi sebagian siswa tidak ubahnya mempelajari Pancasila tahap dua atau bahkan tidak jauh berbeda dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah Bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bersifat multi dimensional, artinya program PKn bukan hanya untuk satu tujuan. Sebagaimana dijelaskan Winataputra (2001) bahwa ada tiga dimensi dalam PKn, yakni (1) PKn sebagai program kurikuler, pada hakikatnya merupakan program PKn yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. (2) PKn sebagai program akademik, merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKn menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi serta teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKn. dan (3) PKn sebagai program sosial kultural. Program PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan masyarakat dengan sasaran semua anggota masyarakat. Tujuannya lebih pada upaya pembinaan warga masyarakat agar menjadi warga negara yang baik dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah.



Program sosial kultural pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru, yakni melalui berbagai program penataran P4. Terjadinya perubahan sistem politik pascareformasi yang menimbulkan euforia politik berlebihan. Penataran P4 dipandang telah menyimpang dari tujuan sehingga tidak berjalan efektif. Padahal apabila dilihat dari kepentingan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program sosial kultural ini sangat penting. Oleh karena itu, perlu dicari strategi program PKn dalam dimensi sosial kultural pada pasca penghentian program penataran P4 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan karakter warga negara Indonesia yang baik.

### **Pemahaman Guru Tentang Integrasi Nilai-nilai Kearifan Lokal**

Semua guru memahami bahwa *content* yang bersifat *structural formal* merupakan perekat, pemersatu Bangsa, serta memperkuat semangat nasionalisme Indonesia dan NKRI. Sedangkan *content informal* bersifat kontekstual tergantung lingkungan tempat di mana siswa berada sehingga memungkinkan pembelajaran dikembangkan secara kontekstual.

Pengembangan *content informal* bersifat kontekstual dalam pembelajaran PKn, dapat dilakukan dengan memecahkan masalah-masalah sosial, melalui pembiasaan, jabat tangan setiap pagi, penerapan kedisiplinan dan berdoa, dan kunjungan. Metode pembelajaran yang dilakukan guru antara lain menggunakan metode penugasan, membuat kliping, wawancara dengan tokoh, dan permainan. Metode pembelajaran yang sering digunakan para guru dalam pembelajaran PKn adalah ceramah, tanya jawab, metode jigsaw, kontekstual, kooperatif, diskusi kelompok, portofolio, dan penugasan.

Budaya Jawa yang memiliki banyak nilai-nilai kearifan lokal, sudah saatnya digali lebih dalam lagi sehingga bisa disosialisasikan kepada generasi muda. Nilai-nilai seperti

gotong-royong, toleransi, tepo seliro, solidaritas dan lain sebagainya sangatlah baik jika ditanamkan pada siswa di sekolah. Dengan demikian harapan memiliki generasi muda yang berbudaya akan terwujud di kemudian hari. Praksis sadar ber-Pancasila itu sendiri harus dimulai sejak dini sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terpatri erat dalam diri manusia Indonesia. Selain komitmen penyelenggara negara maka komitmen warga negara juga tak kalah pentingnya dalam membumikan toleransi. Warga negara harus aktif dalam kehidupan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Semangat kearifan lokal Indonesia seperti saling menolong, menghargai perbedaan, dan hidup bersama dalam keberagaman, nilai-nilai kearifan lokal pada dasarnya merupakan inti dari Pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal/nilai-nilai budaya/pendidikan budi pekerti. PKn bukan semata-mata hanya mengajarkan pasal-pasal Undang-undang Dasar (UUD). Lebih jauh PKn mengkaji perilaku warga negara dalam hubungannya dengan warga negara lain dan alam sekitarnya. Menurut M. Numan Somantri (2001:276) termasuk dalam objek *studi civities* ialah: tingkah laku, tipe pertumbuhan pikir, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral Pancasila), usaha atau kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab.

Dalam hal persiapan mengajar, seluruh responden sudah mempersiapkan segala kebutuhan administratif yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Kebutuhan administratif tersebut antara lain adalah menyiapkan kalender akademik, program semester tahunan, program semester gasal/genap, silabus, kriteria ketuntasan maksimum, serta RPP semester gasal/genap. Langkah-langkah pembelajaran yang dibuat antara lain pendahuluan berupa apersepsi dan pemberian

motivasi. Kegiatan inti berupa eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di akhir pembelajaran dilakukan kegiatan penutup. Mengajarkan PKn bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga mengembangkan partisipasi siswa agar bertanggung jawab sebagai warga negara, sekaligus membangun komunikasi sosial kultural bagi siswa.

Selanjutnya dalam proses pembelajaran, semua responden menyatakan bahwa proses pembelajaran PKn telah diorganisasikan dalam berbagai bentuk, yakni (1) belajar sambil berbuat (*learning by doing*) dan (2) belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Sepuluh guru menambahkan proses belajar PKn juga melalui (3) belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*); (4) belajar melalui pelibatan sosial (*socio-participatory learning*); Pembelajaran PKn melalui interaksi sosial-kultural bersifat kontekstual memungkinkan guru mengintegrasikan nilai-nilai budaya (kearifan lokal). Semua guru (100%) menyatakan setuju.

Situasi yang kondusif untuk belajar diciptakan oleh guru bersama siswa berdasar urutan jawaban yang terbanyak dari responden adalah (1) pendekatan yang *humanistic*; dan guru berorientasi pada siswa (*students' centered*), (2) mengembangkan kemampuan belajar (*learning skills*) yakni meningkatkan kesadaran siswa terhadap identitas bangsa (*learning how to learn*), (3) menggunakan metode yang divariasikan dan menerapkan proses pembelajaran dengan pengalaman langsung sehingga hasil belajar itu akan nyata dan mempribadi (*personalized*) dalam dirinya.

Meskipun guru sangat paham dengan situasi yang kondusif untuk belajar tetapi kenyataan di dalam kelas metode yang paling sering digunakan adalah ceramah, dengan alasan materi PKn yang sangat banyak, namun alokasi waktu yang sedikit meski peran

aktif siswa kurang optimal. Menanggapi peran aktif siswa yang kurang maksimal, guru mensiasatinya dengan menggunakan metode yang lain, yakni tanya jawab, diskusi, serta penugasan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik terhambat oleh materi yang tidak sebanding dengan alokasi waktu.

Banyaknya cakupan materi dalam pembelajaran PKn menjadi salah satu kendala dan kesulitan bagi guru dalam menyusun RPP dan implementasi pembelajaran PKn. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi guru saat pembelajaran PKn dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara-hambatan dalam pembelajaran PKn meliputi: (1) Kesesuaian antara materi PKn dengan alokasi waktu yang terdapat pada kurikulum kurang berimbang; (2) Guru dihadapkan pada motivasi siswa yang rendah dalam mengikuti pelajaran PKn di kelas. (3) Guru juga dihadapkan pada persepsi siswa bahwa pelajaran PKn tidak terlalu penting. (4) Dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, guru terkadang dihadapkan pada realitas masyarakat yang tidak sesuai dengan materi pelajaran. (5) Guru terkadang mengalami kendala dalam menerapkan metode, model ataupun strategi pembelajaran *student centered*. (6) Guru merasa menyampaikan materi PKn sebenarnya mudah namun esensi penting dari pembelajaran PKn yang tujuan akhirnya adalah pengetahuan serta implementasi di lapangan belum bisa tercapai secara maksimal.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirumuskan strategi untuk Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama Berbasis Kearifan Lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan jati diri bangsa. Dari hasil penelitian pendahuluan dan *Focus Group Discussion* terbatas berbagai komponen pe-

mangku kepentingan pendidikan dirumuskan bahwa arah model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan untuk meningkatkan karakter dan jati diri bangsa adalah sebagai berikut. (1) Materi *content informal* dalam PKn yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial budaya peserta didik, yakni budaya Jawa. (2) *Core value* budaya Jawa bersumber dari prinsip hormat dan rukun yang kemudian menjadi harmonisasi kemudian dijabarkan dan dipetakan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter. (3) Untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*) maka pembelajaran dilakukan melalui (a) belajar sambil berbuat (*learning by doing*), (b) belajar memecahkan masalah sosial (*social problem solving learning*), (c) belajar melalui partisipasi sosial (*socio-participatory learning*), dan (d) belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural (*enculturation and socialization*). (4) Implementasi model yang dikembangkan, melalui (a) belajar sambil berbuat, (b) belajar memecahkan masalah sosial, (c) belajar melalui partisipasi sosial direalisasikan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, dan Klarifikasi Nilai. (5) Proses belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural direalisasikan melalui budaya sekolah dan role model dari guru, kepala sekolah, dan orang tua. (6) Untuk merealisasikan tujuan pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan warga negara yang aktif (*active citizen*) digunakan pendekatan *Problem Based Learning* dan Klarifikasi nilai.

*Problem Based Learning* ini dipilih untuk merealisasikan model dilandasi teori konstruktivis. *Problem Based Learning* utamanya dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir pemecahan masalah dan keterampilan intelektual,

pengalaman nyata atau stimulus dan menjadi pelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim, 2000). Dengan *Problem Based Learning* siswa dilatih menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, mandiri serta meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu dengan pemberian masalah yang autentik, siswa dapat membentuk makna dari bahan pelajaran melalui proses belajar selanjutnya menyimpulkan dalam ingatan sehingga dapat digunakan di kemudian hari (Nurhadi, 2004).

Pembelajaran Klarifikasi nilai adalah model pembelajaran penumbuh kembangan nilai moral yang bersentuhan langsung dengan upaya pencarian langsung oleh anak didik secara cerdas, dialogis dan reflektif terhadap problematika dan dilemma moral yang akan selalu dihadapi anak. Karena itu model strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang sangat strategis terutama untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri dalam rangka penumbuh kembangan nilai moral secara cerdas dan elegan bukan melalui paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri (Candee R, 1977: 1249-1250).

Dengan memanfaatkan klarifikasi nilai peserta didik akan merefleksikan dan berfikir secara kritis dan komprehensif akan nilai-nilai yang dimilikinya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan situasi riil kehidupan sehari-hari atau mengkaitkannya dengan persoalan-persoalan yang telah pernah ada dalam kehidupan (Raths, LE.; Merrill Harmil & Sidney B. Simon, 1978: 5).

Pembelajaran klarifikasi nilai disebut juga sebagai inkuiri nilai karena dapat mengembangkan sikap dan kepribadian. Sikap dan kepribadian yang berkembang dengan belajar inkuiri antara lain meragukan kebenaran yang telah lama dan ingin mengetahui hal yang baru, menghargai penalaran sebagai cara untuk memperoleh suatu kebenaran, menghar-

gai data sebagai alat untuk menguji kebenaran, objektif terhadap data yang ada serta menghindari prasangka, bersedia menerima keputusan sementara sebelum mendapatkan kepastian jawaban (Beyer, 1979: 18-20).

Perlunya pengembangan inkuiri nilai didasarkan bahwa penumbuh kembangan nilai-nilai moral pada anak didik ternyata tidak hanya sebatas mengupayakan dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi tumbuhkembangnya nilai-nilai moral dalam kehidupan anak yang akhirnya bermuara pada perilaku moral dalam kehidupan keseharian mereka. Namun yang lebih penting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama adalah menciptakan kemampuan bagi anak-anak didik secara cerdas mampu memahami dan menemukan nilai-nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan, terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif bagi penumbuh kembangan nilai-nilai moral.

### Simpulan dan Saran

Untuk pengembangan pembelajaran PKn yang *powerfull* perlu dilakukan revisi terutama berkaitan dengan (a) integrasi nilai-nilai budaya lokal dan (b) strategi dan metode pembelajaran yang mendukung penguasaan kompetensi PKn dan pendidikan nilai. Berdasarkan analisis SWOT dikembangkan draf model PKn di SMP berbasis kearifan lokal sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pan-

casila untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa dengan didasari oleh: (a) integrasi kearifan lokal budaya jawa yang bersumber dari *core value* hormat, rukun, dan tolong menolong sebagai strategi revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter, (b) untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik, pembelajaran dilakukan dengan belajar sambil berbuat, belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui perlibatan sosial, dan belajar melalui pembiasaan serta interaksi sosial-kultural. (c) Implementasi draf model dilakukan dengan pendekatan pembelajaran *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, dan Klifikasi nilai.

Komponen penting pendukung draf model pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal adalah (1) partisipasi seluruh elemen pemangku kepentingan (unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat), (2) Dikpora merupakan komponen kunci yang menentukan pelaksanaan model, (3) Sekolah yang merupakan komponen utama dalam pelaksanaan model, (4) guru sebagai komponen kunci dalam implementasi model, dan (5) peserta didik yang merupakan merupakan subyek belajar yang diharapkan berperan aktif dalam revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Karena itu, para pihak yang berkaitan dengan implementasi pengembangan pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal untuk penguatan karakter dan jati diri Bangsa harus komitmen dan mempunyai kesamaan persepsi dalam mewujudkan tujuan pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Barker. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beyer, B.K. 1979. *Inquiry in the Social Studies Classroom: A. Strategy for Teaching*. Columbus, OH: Charles E. Merrill Publ.Co.
- Chapin, June R. 2006. *Elementary Social Studies: A Practice Guide*. Pearson/Allyn and Bacon.
- Couto, Richard A. 1998. "The Art of Teaching Democracy: the Practice". *Journal CIVITAS*, Sept.-Oct. V.2 No.5.
- Budimansyah, D. 2012. *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Hannerz, U. 1992. *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. Columbia University Press.
- Hasan, Hamid. 2001. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Jenkins, Henry. 2004. *Pop Cosmopolitanism: Mapping Cultural Flows in an Age of Media Convergence in the New Millennium* (edteds) Marcelo M. Suárez-Orozco and Desirée Baolian Qin-Hilliard University of California Press Berkeley and Los Angeles, California.
- Ibrahim, H. Muslimin. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya: University Press.
- Jarolimek, J. & Foster, C.D. 1976. *Teaching and Learning in the Elementary School*. London: Macmillan Publishing Co., Inc. Antara Kebudayaan dan Kebangsaan" dalam Prisma No. 8, Agustus. Jakarta : LP3ES.
- Kerr, L. 1996. *Sage Advice*. Wood Lake Publishing Inc., 1 Jan 1996 - 256 halaman.
- Kirdi Dipoyudo. 1990. *Membangun Atas Dasar Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi. CSIS.
- Raths, L.E.,H.M & Simon, SB. 1978. *Values and Teaching: Working with values in the classroom*. Second edition. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Martorella, P. 1994. *Social Studies for Elementry School Children: Developing Young Citizen*. New York: MacMillan.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Nurhadi. 2004. "Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw Terhadap Prestasi Belajar Matematika Geometri Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa". *Dalam Tesis*. Surakarta.
- Poespowardojo, S. 1989. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Samsuri. 2010. "Pembentukan Karakter Warga Negara Demokratis dalam Politik Pendidikan Indonesia Periode Orde Baru Hingga Era Reformasi". *Dalam MGMP PKn Kab.Sleman*. Sleman Press.

- Sapriya dan Winataputra. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Model Pengembangan Materi dan Pembelajaran*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Somantri, Nu'man. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Dedi Supriadi & Rohmat Mulyana (ed). Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.
- Suseno, Franz Magnis. 1996. *Etika Jawa, Sebuah Analisa falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, HAR. 2007. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winataputra, Udin S. & Sapriya. 2003. "Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan IPS di Sekolah Dasar". *Jurnal Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan*. Tahun 12 Nomor 2, November 2003.